BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata

2.1.1 Pengertian Pariwisata

Menurut UU No.10 Tahun 2009 istilah pariwisata berasal dari wisata, yang mengandung arti sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan disebut sebagai wisatawan. Keseluruhan fenomena kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian wisata dan wisatawan tersebut, diberikan batasan pengertian atau didefinisikan dengan istilah pariwisata.

Sektor Pariwisata hingga saat ini masih menjadi sektor prioritas pemerintah karena dinilai mampu menjadi lokomotif pergerakan perekonomian bangsa. Pengelolaan sektor pariwisata pun terus dikembangkan oleh pemerintah, melalui berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk membuat pariwisata Indonesia lebih maju dan dikenal di mata dunia. Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia (Elistia, 2020, hlm. 1).

Pariwisata dipandang sebagai sumberdaya ekonomi yang potensial. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya misalnya: sektor industri, sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor primer lainnya, pariwisata memiliki banyak keunggulan di antaranya: pengembangan pariwisata merupakan hal yang dapat dilaksanakan dengan waktu yang paling cepat dengan metode yang paling mudah dan sederhana. Selain itu pengembangan pariwisata akan melibatkan masyarakat sehingga banyak pihak dapat menikmati manfaatnya dan juga dapat mendorong

pelestarian lingkungan alam, budaya dan sosial masyarakat (Palimbunga, 2017, hlm. 18).

Sinclair dalam Rahayu, dkk., (2016, hlm. 5) menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti usaha akomodasi, transportasi,dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata (Sunaryo, 2013, hlm. 217).

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta.

2.1.2 Komponen Pengembangan Pariwisata

Pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata perlu didukung oleh keberadaan unsur-unsur yang membentuk suatu sistem. Menurut Cooper dalam Tingginehe, dkk., (2019, hlm. 512) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat)

komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction*, *accessibility*, *amenity*, dan *ancilliary* yang diuraikan sebagai berikut:

1. *Attraction* (Atraksi) Merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan suatu daerah, dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Modal atraksi yang dapat menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu: *Natural Resources* (Alami), Atraksi Wisata Budaya, dan Atraksi buatan manusia itu sendiri.
2. *Accessibility* (Aksesibilitas) merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata harus di lengkapi aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut mudah untuk dikunjungi.
3. *Amenity* (Fasilitas atau Akomodasi) merupakan segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada didaerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang harus tersedia seperti: penginapan, rumah makan, tempat rekreasi, tempat berkemah, transportasi dan agen perjalanan. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air atau toilet, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah.
4. *Ancilliary* (pelayanan tambahan) Pelayanan harus disediakan oleh pemda suatu daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisata.

Yoeti (1997 hlm. 165) pengembangan suatu kawasan wisata juga tergantung pada apa yang dimiliki kawasan tersebut untuk di tawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat di pisahkan dari peranan para pengelola kawasan wisata bahwa berhasilnya suatu tempat wisata ada pada tiga A (3A) yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accesbility*), dan fasilitas (*amenities)*. Menurut Istiyani (2021, hlm. 11) konsep-konsep desa wisata yang dipenuhi yaitu:

1. Akomodasi adalah tempat tinggal bagi penduduk yang menempati unit-unit sedang berkembang di wilayah desa tersebut.

2. Atraksi kehidupan penduduk yang kesehariannya yang bisa terintegrasinya wisatawan atas partisipan contohnya adanya kursus Tari tradisional, bahasa dan lain sebagainya merupakan ciri khas dan keindahan alam, keuinkan dan langkah untuk di jumpai ditempat lain.
3. Keindahan alam ini dimana wilayah Desa tersebut memiliki pemandagan alam yang indah yang mampu menarik perhatian para pengunjung. Namun wilayah yang memiliki kondisi wilayah yang biasa juga dapat memikat hati para pengunjung tergantung dari kreaktifitas dari masyarakat setempat sehingga tak kalah saing dengan Desa yang memiliki banyak keindahan alamnya.

Berdasarkan uraian di atas latar belakang kehadiran desa wisata adalah yang memiliki bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Di samping memiliki berbagai keunikan, desa wisata juga harus memiliki berbagai fasilitas penunjang sebagai daerah tujuan wisata. Fasilitas tersebut akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang sebaiknya dimiliki oleh sebuah desa wisata antara lain adalah sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Berkaitan dengan sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata *(home stay)* di mana wisatawan dapat tinggal bersama penduduk setempat di desa tersebut sehingga mereka bisa ikut merasakan suasana pedesaan yang masih asli dan alami dan dapat menjadi pengalaman autentik (Sugiarti, dkk., 2016, hlm. 17).

Menurut Yoeti (1997, hlm.109) terdapat beberapa faktor penting yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksudkan yaitu:

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya
3. Perjalanan itu walaupun ada bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi
4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

2.1.3 Community Based Tourism

Di Indonesia, pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) diterapkan antara lain dalam pengembangan daya tarik wisata alam maupun budaya. Masyarakat menduduki posisi sebagai bagian integral yang ikut berperan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan itu sendiri. Masyarakat merupakan pelaku langsung kegiatan pariwisata dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan budaya sehingga memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan karena menyangkut kepentingan hidup mereka. Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari atraksi pariwisata sehingga pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat.

Community Based Tourism (CBT) atau diterjemahkan sebagai pariwisata berbasis komunitas/masyarakat, bentuk pariwisata ini memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Hausler dalam Herdiana (2019, hlm. 62) menyatakan bahwa CBT merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan kepada masyarakat lokal, baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung.

Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan C*ommunity-based management* (CBM) atau managemen berbasis masyarakat, yaitu: pendekatan pengelolaan program yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. Carter dalam Zubaedi (2013, hlm. 65) memberikan definisi CBM adalah suatu strategi untuk mewujudkan praktek pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. CBM membawa konsekuensi bahwa masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Anstrand mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan,

sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. mencoba melihat CBT bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi "*induced impact*" dari aspek sosial, budaya dan lingkungan. Suansri menguatkan definisi CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan (Wiwin, 2018, hlm. 71).

Prinsip dasar *Community Based Tourism* yaitu membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan suatu daya tarik wisata, dengan ikut berpartispasi, masyarakat lokal ikut mendapatkan manfaat dan keuntungan secara ekonomis dari partisipasi mereka, selain itu masyarakat lokal ikut bertanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan sumber daya pariwisata yang ada di kawasan daerah tempat mereka tingga (Palimbunga, 2017, hlm. 23).

Dengan mengacu pada prinsip dasar dari CBT dari UNEP dan WTO, Sunasri (2003, hlm. 21- 22) mengembangkan lima prinsip yang merupakan aspek utama dalam pengembangan *Community Based Tourism* sebagai berikut:

1. Prinsip ekonomi dengan indikator timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal.
2. Prinsip sosial dengan indikator terdapat peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua dan terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas.
3. Prinsip budaya dengan indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal.

4. Prinsip lingkungan dengan indikator pengembangan *carryng capacity area*, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan adanya keperdulian tentang pentingnya konservasi.
5. Prinsip politik dengan indikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan terdapat makanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA.

Selain itu, prinsip dasar CBT menurut UNEP dan WTO (2005) sebagai berikut:

1. Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
2. Pengikut sertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek
3. Mengembangkan kebanggaan komunitas
4. Mengembangkan kualitas hidup komunitas
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan
6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal
7. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas
8. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas
10. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek-proyek yang ada di komunitas.

Menurut Wiwin (2018, hlm. 81) prinsip-prinsip CBT dari UNEP dan WTO dapat dikategorikan dalam prinsip sosial (poin 2,3,4) yang berkaitan dengan kualitas internal komunitas, prinsip ekonomi (poin 1,9) yang berkaitan dengan kepemilikan usaha pariwisata dan pendistribusian keuntungan/pendapatan kepada anggota komunitas, prinsip budaya (poin 6,7,8,) yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan toleransi budaya melalui kegiatan pariwisata, prinsip lingkungan (poin 5) berkaitan dengan terjaganya kualitas lingkungan dan kegiatan pariwisata dan prinsip politik (poin 10) yang berkaitan dengan kekuasaan untuk ikut menentukan presentase pendapatan (pendistribusian pendapatan).

2.1.4 Keterkaitan Partisipasi Masyarakat dengan Community Based Tourism

Pariwisata merupakan sektor yang memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam pengembangannya. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting. Nilai modal sosial yang terkandung dalam partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang dapat mendorong pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community-Based Tourism* (CBT) telah menjadi pendekatan yang semakin diperhatikan dalam industri pariwisata.

Dalam konteks *Community-Based Tourism* (CBT), partisipasi masyarakat memungkinkan mereka untuk menjadi pemangku kepentingan utama, menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta berkontribusi dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai inisiatif wisata. *Community-Based Tourism* (CBT) menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata, dengan tujuan mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat.

Adanya partisipasi masyarakat yang kuat, program *Community-Based Tourism* (CBT) dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara wisatawan dan penduduk lokal, sehingga memungkinkan pertukaran budaya yang lebih mendalam dan autentik. Melalui partisipasi dalam penyediaan layanan wisata, seperti *homestay*, pemandu lokal, atau produksi kerajinan tangan, masyarakat dapat mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih langsung dan merasa memiliki peran aktif dalam pembangunan komunitas mereka.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan dalam memastikan bahwa aspek lingkungan dan budaya dari destinasi wisata dijaga dan dilestarikan dengan baik. Melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya, komunitas lokal dapat mengambil tanggung jawab atas konservasi dan menjaga keaslian warisan mereka, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak wisatawan yang tertarik pada pengalaman yang berarti dan berkesan.

Dengan demikian, keterkaitan partisipasi masyarakat dengan *Community-Based Tourism* (CBT) menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial, sementara wisatawan

dapat merasakan pengalaman yang lebih otentik dan berdampak positif. Selain itu, CBT juga berpotensi meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan keberlanjutan pariwisata, menjadikannya model yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat lokal dan lingkungan yang dilewati destinasi wisata.

2.2 Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Sumarto (2003) partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat (Palimbunga, 2017, hlm.18). Pitana (2005, hlm. 56) menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan *"genuine participation"* atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan kontribusi individu-individu dalam suatu komunitas atau masyarakat dalam berbagai kegiatan, proses pengambilan keputusan, dan usaha untuk mempengaruhi perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam lingkungan sosial mereka. Partisipasi masyarakat mencakup berbagai bentuk, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta berkontribusi dalam menyusun kebijakan atau program yang mempengaruhi kehidupan bersama.

Peran partisipasi masyarakat dianggap penting dalam pembangunan sosial dan kemajuan masyarakat karena melibatkan warga dalam proses pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah, sehingga dapat memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat harus memiliki partisipasi dalam pengembangan desa

wisata sejak dari awal, masyarakat dijadikan aktor utama mulai dari tahap identifikasi masalah hingga tahap penyelenggaraan desa wisata.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu pengembangan wisata juga dikatakan oleh Asley dalam Kriska, dkk., (2019, hlm. 13) bahwa penduduk lokal merupakan pengelola/pengguna lahan, pekerja, pengambil keputusan dalam pengembangan wisata. Sebagai subyek utama dalam industri wisata, masyarakat memiliki hak yang mutlak secara utuh terhadap pengembangan wilayahnya sebagai destinasi wisata sehingga masyarakat memegang peran sebagai pengontrol bentuk, pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerahnya.

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata secara langsung sangat perlu adanya. Partisipasi masyarakat dapat ditumbuhkan dan digerakkan melalui usaha penerangan serta pengembangan komunikasi sosial yang sehat, yang dilakukan melalui dialog yang luas dan bersifat terbuka, terarah, jujur, bebas dan bertanggung jawab, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antar golongan masyarakat itu sendiri.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Peran Masyarakat

Menurut Laksana (2013) partisipasi masyarakat dalam suatu implementasi program dapat ditinjau melalui bentuknya, yaitu bagaimana bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam pengembangan kegiatan wisata di daerahnya. Bentuk partisipasi dapat berupa partisipasi nyata (memiliki wujud) dan partisipasi tidak nyata (abstrak), selain itu partisipasi nyata dapat berbentuk materiil dan tenaga, sedangkan partisipasi yang tidak nyata yaitu ide/gagasan (Kriska, dkk., 2019, hlm. 13).

Ada empat jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam perannya menurut Dwiningrum (2014, hlm. 61), yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi, Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

2.3 Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial termasuk sosiologi di abad modern hingga sekarang. Dimana teori ini berbicara bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural fungsional Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam

masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau actor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya (Ritzer, 2011, hlm. 25).

Craib berpendapat bahwa pandangan Parsons menetapkan empat persyaratan fungsional yaitu (1) setiap sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan (*adaptation),* (2) setiap siistem harus memiliki suatu alat untuk memobilisasi sumbernya supaya dapat mencapai tujuan-tujuan dan dengan demikian mencapai gratifikasi *(goal attainment*), (3) setiap sistem harus mempertahankan koordinasi internal dari bagian-bagian dan membangun cara-cara yang berpautan dengan deviansi atau harus mempertahankan kesatuannya *(integration),* dan (4) setiap sistem harus mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang.

Empat konsep yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, empat konsep tersebut sangat dibutuhkan agar suatu sistem atau struktur sosial dapat terus bertahan. Selain itu sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas, sehingga akan dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.

Menurut Sanderson dalam Rinda dan Hasbi (2018, hlm. 112), ciri pokok dari struktural fungsional adalah gagasan tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat *(soecietal needs).* Para penganut teori ini percaya bahwa masyarakat sangat serupa dengan organisasi biologis, karena mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarkat dapat melangsungkan keberadaannnya yang setidaknya dapat berfungsi dengan baik.

Pemilihan teori struktural-fungsional sebagai dasar untuk penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam *community based tourism* (CBT) adalah langkah yang penting dan beralasan. Teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi sebagai sistem sosial yang kompleks, yang sesuai dengan konteks *community based tourism* yang melibatkan berbagai institusi sosial seperti pemerintahm, komunitas lokal hingga keluarga. Dengan menggunakan teori struktural-fungsional, penelitian dapat menganalisis bagaimana

berbagai elemen dalam masyarakat berinteraksi dan berkontribusi pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Teori ini juga membantu dalam memahami bagaimana keseimbangan dan stabilitas sosial dijaga dalam konteks *community based tourism*, serta bagaimana adaptasi terhadap perubahan dan interdependensi antar institusi sosial berpengaruh pada tingkat partisipasi. Dengan demikian, teori struktural-fungsional memberikan landasan yang kokoh untuk memahami dinamika sosial dalam CBT dan implikasinya dalam pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat, peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sawatsky, Tara.2003	The Influence of Social Capital on The Development of Nature Tourism: A Case Study From Bahia Magdalena, Mexico	-Menilai modal sosial masyarakat -Menentukan apa yang mempengaruhi modal sosial dan masyarakat terhadap struktur pariwisata -Mengevaluasi kondisi sosial yang ada dan menyarankan pengembangan masa depan pariwisata	-PCA -Analisis Cluster	-Hubungan kepercayaan -Timbal balik dan pertukaran -Aturan dan Norma -Keterhubunga dalam jaringan dan kelompok	Terdapat tiga kelompok (PSC, PM, PALM) yang diteliti dan masing-masing kelompok memiliki modal sosial yang bervariasi. Hasil analisis cluster menunjukkan bahwa Cluster 1 (individualis) ditemukan di PSC dengan hasil bonding rendah dan bridging rendah. Cluster 2 (Komunitas Oriented) ditemukan di PM ditandai dengan bonding dan bridging menengah.

						Cluster 3 (Penyelenggara) ditemukan di PALM dengan hasil bonding menengah dan bridging tinggi. Komunitas yang memiliki bridging tinggi lebih mudah untuk mengakses, cenderung memiliki lebih banyak kekayaan dan warga terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih beragam. Rekomendasi untuk pengembangan pariwisata berbasis alam di wilayah studi berkaitan dengan karakteristik fisik dan teknologi meliputi: menekankan pada kegiatan baru dan meningkatkan dukungan pembangunan infrastruktur
2.	Claiborne, Petra.	Community Participation in Tourism Development ant The Value of Social Capital (The Case Of Bastimentos *Bocas del Toro,Panama)*	Mengetahui kondisi dan alasan yang menyebabkaan kontribusi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan bagaimana tindakan kolektif yang saling menguntungkan dapat	-Focus Group -Analisis Narrative	-Hubungan Kepercayaan -Timbal Balik dan pertukaran -Aturan dan norma umum -Keterhubungan dalam jaringan dan kelompok (baik di dalam maupun di luar masyarakat)	Terdapat 2 komunitas yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 komunitas tersebut memiliki perbedaan modal sosial. Perbedaan tersebut dikarenakan latar belakang sejarah sosial budaya 2 komunitas yang bertolak belakang. Komunitas 1

			memainkan peran penting.			merupakan masyarakat yang sulit melibatkan diri dalam inisiatif dan tindakan bersama karena tidak memiliki modal sosial struktural dan kognitif, serta memiliki bonding, bridging, dan linking yang lemah karena kurangnya kepercayaan dan dukungan. Mereka memiliki banyak pendapat untuk dikatakan, namun tidak ada penegakan atau tindakan yang dilakukan. Komunitas 2 merupakan masyarakat yang berada dalam pengembangan pariwisata yang bijaksana karena LSM telah memperkenalkan konsep pariwisata dan membantu mereka dalam memfasilitasi kedatangan orang asing dalam komunitas mereka sehingga mereka lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka memiliki hubungan kepercayaan yang lebih kuat dan koneksi di berbagai jaringan

						dan kelompok sosial telah meningkat. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam pengembangan pariwisata. Sehingga perlu diperhitungkan berbagai aspek saat mempertimbangkan pengembangan pariwisata didalam suatu masyarakat.
3.	Michael Rudolfus Sawu, Dian Pramita Sugiarti (2020)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan *Community Based Tourism* Di Desa Wisata Waturaka, Kabupaten Ende	-Untuk melihat pengelolaan komponen produk pariwisata dan partisipasi masyarakat. -Untuk melihat keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor dan sasaran dari pengelolaan *community based tourism* di Desa Wisata Waturaka	Metodelogi kualitatif	-Atraksi -Aksebilitas -Amenitas - Kelembagaam	Berdasarkan substansi dari pembahasan diatas maka dapa disimpulkan Desa Wisata Waturaka berbasis masyarakat memiliki keterlibatan dari masyarakat lokal yang signifikan dalam pengelolaan komponen produk pariwisata yang dimiliki baik berupa produk wisata alam dan budaya. Pengelolaan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif.
4.	Ika Pujiningrum Palimbunga (2017)	Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kampung	Untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi, faktor pendukung dan faktor	Analisis deskriptif kualitatif	-Perencanaan (*planning*), -Pelaksanaan (*actuating*), dan -	Bentuk partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi

		Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua	penghambat partisipasi dan mengetahui dampak pengembangan pariwisata terhadap masyarakat Kampung Tablanusu.		Pengawasan (*controlling*).	partisipasi terbagi menjadi dua yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong partisipasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah golongan umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan sedangkan faktor eksternal yaitu lokasi tempat bekerja, kondisi tempat bekerja dan kebijakan pengelola.
5.	Dian Herdiana (2019)	Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat	Untuk mengetahui bagaimana pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat.	Pendekatan kepustakaan (library research)	-Peran masyarakat sebagai pemerkarsa - Peran masyarakat sebagai pelaksana -Peran masyarakat sebagai penyerta - Peran masyarakat sebagai peninjau -Peran masyarakat sebagai	Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menawarkan peran yang lebih kepada masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan proses pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat juga mengakui eksistensi masyarakat sebagai bagian integral dari desa, sehingga proses yang dilaksanakan ditujukan sepenuhnya untuk

					penerima manfaat	memberdayakan masyarakat dan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

2.5 Alur Pemikiran

Curug Cigentis yang terletak di Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang sebagai daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang menakjubkan. Namun, selain menjadi tujuan wisata yang menarik, Curug Cigentis juga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan *Community-Based Tourism* (CBT) atau Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Partisipasi masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan Curug Cigentis sebagai destinasi CBT. Masyarakat sekitar Curug Cigentis dapat menjadi bagian integral dalam mempromosikan, menjaga, dan mengelola destinasi wisata ini sehingga melalui partisipasi masyarakat lokal, Curug Cigentis dapat menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat Desa Mekarbuana. Sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

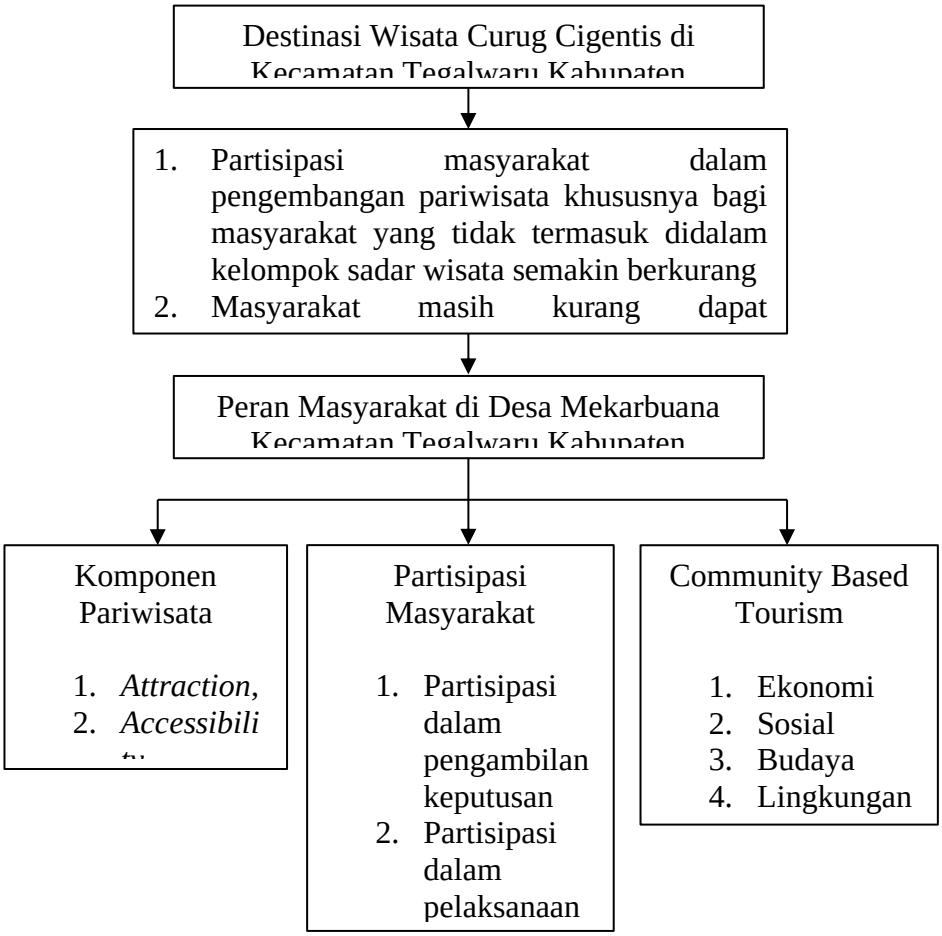

Gambar 2.2 Skema Alur Pemikiran